

PENERAPAN AKUNTANSI DI SEKTOR PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM UPAYA MENCEGAH KECURANGAN

Khadijah Darwin^{1*}, Rosnita², Patta Isa³, Nur Harmianti Beloraja⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

*Korespondensi: khadijahdarwin@unismuh.ac.id

Info Artikel

Diterima:
28-11-2025

Disetujui:
15-12-2025

Dipublikasikan:
25-12-2025

© 2025 Education
and Talent
Development Center
of Indonesia
Under the license
CC-BY-SA



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penerapan akuntansi sektor publik dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah serta kontribusinya terhadap upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara. Kajian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko fraud di sektor publik yang disebabkan oleh besarnya pengelolaan anggaran, kompleksitas birokrasi, lemahnya pengendalian internal, serta rendahnya integritas pada sebagian aparatur pemerintahan. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal, hasil penelitian, dan referensi akademik lain yang membahas akuntansi sektor publik, akuntabilitas kinerja, dan pencegahan fraud. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses identifikasi, pengelompokan, perbandingan, dan sintesis temuan dari berbagai literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang baik mampu meningkatkan transparansi, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas instansi pemerintah, sehingga dapat memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran dan kecurangan. Selain itu, efektivitas pencegahan fraud juga dipengaruhi oleh kualitas pengendalian internal, fungsi audit, serta integritas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara sistem akuntansi, pengawasan, dan budaya integritas dalam mendukung pemerintahan yang akuntabel.

Kata kunci: Akuntansi sektor publik, akuntabilitas, kinerja pemerintah, kecurangan.

Abstract

This study aims to analyze the role of public sector accounting implementation in improving government performance accountability and its contribution to fraud prevention efforts in state financial management. This study is motivated by the high risk of fraud in the public sector caused by large budget management, bureaucratic complexity, weak internal controls, and low integrity among some government officials. The method used is a literature review by examining various relevant scientific sources, such as journals, research results, and other academic references that discuss public sector accounting, performance accountability, and fraud prevention. The data obtained are analyzed descriptively and qualitatively through the process of identification, grouping, comparison, and synthesis of findings from various literature. The results of the study indicate that the implementation of good public sector accounting can improve transparency, the quality of financial reports, and the accountability of government

agencies, thereby minimizing the opportunity for budget misuse and fraud. In addition, the effectiveness of fraud prevention is also influenced by the quality of internal controls, the audit function, and the integrity of human resources within the government environment. Thus, public sector accounting functions not only as a financial recording and reporting system, but also as a strategic instrument in realizing good, clean, and responsible governance. This research emphasizes the importance of synergy between accounting systems, oversight, and a culture of integrity in supporting accountable governance.

Keywords: Public sector accounting, accountability, government agency performance, fraud.

Pendahuluan

Kecurangan (fraud) dalam sektor publik masih menjadi persoalan serius karena pengelolaan sumber daya negara berlangsung dalam struktur birokrasi yang kompleks, melibatkan anggaran besar, banyak titik keputusan, dan risiko penyalahgunaan kewenangan. Dalam dokumen Anda, pendahuluan menegaskan bahwa organisasi sektor publik cenderung lebih rentan terhadap kecurangan ketika akuntabilitas manajerial lemah, budaya pengendalian internal tidak efektif, dan risiko tidak diidentifikasi secara memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalah fraud di sektor publik bukan sekadar persoalan perilaku individual, tetapi juga terkait dengan kelemahan sistem tata kelola, pelaporan, dan pengawasan. Karena itu, pembahasan mengenai akuntansi sektor publik menjadi penting, sebab sistem akuntansi yang baik dapat menyediakan informasi yang andal untuk pengendalian, evaluasi, dan pertanggungjawaban publik (Rohim et al., 2022; Fan, 2024).

Dalam konteks pemerintahan modern, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban lembaga publik untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan membuka hasil pengelolaan sumber daya kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut tidak dapat dipisahkan dari transparansi pelaporan keuangan, karena kualitas informasi keuangan menentukan sejauh mana publik, lembaga pengawas, dan pembuat kebijakan dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam organisasi publik telah berkembang dari sekadar kewajiban administratif menjadi mekanisme inti yang menghubungkan pelaporan, pengawasan, legitimasi, dan pembelajaran organisasi (Fan, 2024). Sejalan dengan itu, standar pelaporan sektor publik internasional juga menekankan bahwa pelaporan yang transparan atas posisi keuangan, risiko, dan penggunaan sumber daya publik sangat penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan kualitas pengambilan keputusan pemerintah (IPSASB, 2024).

Urgensi penguatan akuntansi sektor publik semakin nyata ketika dikaitkan dengan berbagai kasus korupsi dan penyimpangan anggaran yang merugikan masyarakat. Dokumen Anda mencontohkan kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 sebagai ilustrasi bahwa lemahnya integritas dan pengawasan dapat menyebabkan bantuan publik tidak tepat sasaran. Kasus seperti ini memperlihatkan bahwa penyimpangan dalam sektor publik tidak hanya mengurangi efisiensi anggaran, tetapi juga merusak legitimasi pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Setiawan & Jesaja, 2022). Secara lebih luas, temuan global juga menunjukkan bahwa fraud masih menimbulkan kerugian besar lintas sektor, termasuk sektor pemerintahan, sehingga organisasi perlu membangun sistem deteksi dan pencegahan yang lebih kuat, terutama melalui pengendalian internal, pelaporan yang berkualitas, dan pengawasan yang konsisten (ACFE, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan akuntansi sektor publik perlu ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dan mencegah kecurangan. Sistem akuntansi yang tertata baik memungkinkan setiap transaksi dicatat, dilaporkan, dan ditelusuri secara lebih akurat, sehingga mempersempit ruang manipulasi serta memperkuat pengawasan atas penggunaan anggaran. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada dukungan pengendalian internal, audit yang independen, manajemen risiko fraud, dan budaya integritas di lingkungan birokrasi. Pedoman internasional menekankan bahwa pencegahan dan deteksi fraud dalam sektor publik harus menjadi bagian dari desain pengendalian internal, sedangkan kerangka manajemen risiko fraud menuntut instansi pemerintah untuk secara aktif menilai risiko, merancang kontrol, serta memantau tindak lanjut perbaikannya (INTOSAI, 2004; GAO, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah bagaimana penerapan akuntansi sektor publik berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas pemerintah dalam upaya mencegah kecurangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka (literature review) untuk mengkaji secara sistematis berbagai hasil penelitian yang relevan mengenai penerapan akuntansi sektor publik, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan pencegahan kecurangan. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi, menelaah, dan menginterpretasikan sejumlah sumber ilmiah yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian. Tinjauan pustaka dipilih karena mampu memberikan pemahaman konseptual dan empiris yang komprehensif mengenai hubungan antara penerapan akuntansi sektor publik dengan peningkatan akuntabilitas pemerintah dalam mencegah fraud. Dalam konteks ini, kajian dari Santoso dan Pambelum (2008), Rohim et al. (2022), serta Khairan et al. (2024) menjadi landasan penting untuk menjelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi yang baik berkontribusi pada penguatan akuntabilitas dan pengendalian terhadap potensi penyimpangan.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai referensi berupa jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik lain yang sesuai dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan membandingkan, mengelompokkan, dan mensintesis temuan-temuan utama dari setiap sumber agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai peran akuntansi sektor publik dalam menciptakan transparansi, meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan menekan risiko kecurangan di lingkungan pemerintah. Analisis ini juga menekankan pentingnya dukungan pengawasan internal dan kualitas aparatur dalam memperkuat efektivitas sistem akuntansi sektor publik, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Wiyana et al. (2023), Sari et al. (2024), dan Wahyuni et al. (2024). Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelitian menghasilkan simpulan yang berbasis pada sintesis teori dan temuan empiris dari berbagai literatur yang relevan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang baik memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah serta pencegahan kecurangan. Sistem akuntansi yang disusun secara transparan, tertib, dan akuntabel mendorong pengelolaan keuangan negara menjadi lebih efisien, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian yang mampu mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan dana publik.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Santoso dan Pambelum (2008) serta Rohim et al. (2022) yang menegaskan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berkontribusi nyata terhadap penguatan akuntabilitas instansi pemerintah dan upaya pencegahan fraud.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa semakin baik penerapan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik, semakin tinggi pula kualitas tata kelola pemerintahan yang dihasilkan. Penerapan sistem akuntansi yang memadai berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan, sehingga informasi keuangan yang disajikan menjadi lebih relevan, andal, dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja instansi pemerintah. Kondisi ini juga memperkuat fungsi pengawasan atas penggunaan anggaran publik karena setiap transaksi dan kebijakan anggaran dapat ditelusuri secara lebih jelas. Temuan ini didukung oleh Wiyana et al. (2023) yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta oleh Wahyuni et al. (2024) yang menekankan hubungan akuntansi sektor publik, akuntabilitas, dan pencegahan kecurangan dalam instansi pemerintah.

Hasil penelitian juga menegaskan pentingnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berkualitas sebagai fondasi utama dalam meminimalkan kecurangan laporan keuangan. Implementasi SAP yang baik memungkinkan pemerintah menyusun laporan keuangan sesuai prinsip yang berlaku, memperjelas prosedur pencatatan dan pelaporan, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang. Dalam kajian ini, penerapan SAP dipandang mampu membatasi ruang terjadinya manipulasi laporan keuangan karena setiap proses pengelolaan anggaran harus mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sari et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah berperan dalam mencegah fraud laporan keuangan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah.

Selain aspek teknis akuntansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan kecurangan juga ditentukan oleh efektivitas pengendalian internal, kualitas pengawasan, dan integritas aparatur pemerintah. Sistem akuntansi yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan lingkungan organisasi yang menjunjung etika, pengawasan independen, serta komitmen pimpinan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, pencegahan fraud dalam sektor publik harus dipahami sebagai hasil dari sinergi antara sistem akuntansi, pengendalian internal, dan kualitas sumber daya manusia. Kesimpulan ini didukung oleh Khairan et al. (2024) yang menyoroti dampak penerapan akuntansi sektor publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap pencegahan fraud, serta oleh Mardiasmo (2004) yang menekankan bahwa kompleksitas sektor publik menuntut informasi akuntansi yang relevan dan pengawasan yang kuat dalam pengambilan keputusan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola yang memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah dan menutup ruang terjadinya kecurangan. Dalam dokumen Anda, bagian hasil menunjukkan bahwa praktik akuntansi yang transparan dan akuntabel berkorelasi dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan, efektivitas pengawasan penggunaan anggaran, dan menurunnya potensi penyalahgunaan dana publik. Temuan ini konsisten dengan kajian Wiyana et al. (2023), Khairan et al. (2024), dan Sari et al. (2024) yang sama-sama menempatkan akuntansi sektor

publik, transparansi laporan keuangan, serta kualitas aparatur sebagai faktor penting dalam pembentukan akuntabilitas dan pencegahan fraud.

Secara lebih luas, temuan tersebut juga sejalan dengan perkembangan literatur mutakhir yang menempatkan akuntabilitas sebagai kerangka sentral dalam organisasi publik, bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan mekanisme yang menghubungkan pelaporan, pengawasan, pembelajaran organisasi, dan legitimasi publik (Fan, 2024). Dengan demikian, pembahasan ini memperlihatkan bahwa semakin baik kualitas sistem akuntansi pemerintah, semakin besar pula kemampuan instansi publik untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal, memperkuat evaluasi kinerja, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas akuntansi sektor publik dalam mencegah kecurangan sangat ditentukan oleh kekuatan pengendalian internal, independensi pengawasan, dan integritas lembaga. Bagian pembahasan dalam dokumen Anda sudah menekankan bahwa kelemahan kontrol internal, longgarnya prosedur, dan keterlibatan manajemen dapat menciptakan celah fraud, sehingga sistem akuntansi tidak cukup hanya dirancang secara teknis, tetapi harus dioperasikan dalam lingkungan pengendalian yang sehat.

Penekanan ini didukung oleh prinsip-prinsip Intosai yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, independensi audit, dan audit sektor publik sebagai fondasi pengawasan pemerintahan yang efektif. Selain itu, GAO menegaskan bahwa pelaporan tahunan mengenai kontrol anti-fraud dan manajemen risiko fraud membantu memperkuat pengawasan legislatif, memusatkan perhatian instansi pada strategi pencegahan, dan mendorong pembangunan kontrol yang kuat sejak awal agar tidak terjebak pada pendekatan “pay-and-chase” setelah kerugian terjadi (GAO, 2023). Sejalan dengan itu, panduan kolaborasi auditor publik terbaru juga menekankan bahwa auditor internal dan eksternal pada sektor publik sama-sama menelaah sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola untuk memperbaiki kontrol serta kinerja organisasi (*The Institute of Internal Auditors*, 2024). Karena itu, pembahasan yang lebih kuat dapat menegaskan bahwa pencegahan fraud di sektor publik merupakan hasil sinergi antara standar akuntansi yang baik, pengendalian internal yang efektif, audit yang independen, dan budaya integritas yang konsisten di seluruh tingkatan organisasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang efektif berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, memperbaiki kualitas pelaporan keuangan, serta memperkuat upaya pencegahan kecurangan melalui transparansi, kepatuhan terhadap standar, dan penguatan sistem pengendalian internal. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, instansi pemerintah disarankan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan standar akuntansi, memperkuat fungsi audit dan pengawasan internal, serta membangun budaya integritas di seluruh level organisasi agar potensi fraud dapat diminimalkan secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods agar dapat memberikan bukti yang lebih terukur mengenai pengaruh akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas dan pencegahan kecurangan pada berbagai konteks lembaga pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational fraud 2024: A report to the nations*. Association of Certified Fraud Examiners.
- Fan, Y. (2025). Accountability in public organization: A systematic literature review and future research agenda. *Public Organization Review*, 25, 295–310.
- Government Accountability Office. (2023). *Fraud risk management: Key areas for federal agency and congressional action* (GAO-23-106567). U.S. Government Accountability Office.
- International Organization of Supreme Audit Institutions. (2004). *Guidelines for internal control standards for the public sector*. INTOSAI.
- International Public Sector Accounting Standards Board. (2024). *2024 handbook of international public sector accounting pronouncements*. IFAC.
- Khairan, U., Ikhyannuddin, I., Murhaban, M., & Firdaus, R. (2024). Dampak penerapan akuntansi sektor publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap pencegahan fraud (Studi kasus Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(3), 371–386. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i3.10689>
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Rohim, M. A. A., Sudaryanti, D., & Hariri, H. (2022). Analisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud. *E-JRA*, 11(02).
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1), 14–33.
- Sari, F. M., Safitri, A., & Elshifa, A. (2024). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah terhadap pencegahan fraud laporan keuangan (Studi empiris pada Kota Pekalongan). *Journal of Social and Policy Issues*, 4(2), 74–78. <https://doi.org/10.58835/jspi.v4i2.331>
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis perilaku korupsi aparatur pemerintah di Indonesia (Studi pada pengelolaan bantuan sosial di era pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 4(2), 33–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- The Institute of Internal Auditors. (2024, October). Online exclusive: Public sector partners. *Internal Auditor*.
- Wahyuni, N. S., Harahap, Z., Sembiring, P. B., Tarigan, D. T. B., & Ramadani, N. (2024). Pengaruh akuntansi sektor publik dalam penerapan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 715–720.
- Wiyana, A., Sufiati, S., Sambo, E. M., & Nurasratunnisa, Y. (2023). Penerapan akuntansi sektor publik dan transparansi laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 240–250.